Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah
Vol. 5 No. 1 Tahun 2022
URL : http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari
P-ISSN : 2655-3600 E-ISSN: 2714-7908

Pemberedelan Pers Pasca Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974

M. Rifki Jum'at [a, 1]*, Dede Wahyu Firdaus [b, 2]
[a] Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
[1] 192171052@student.unsil.ac.id; [2] dede.firdaus@unsil.ac.id;
* Corresponding author

Abstrak

Di awal pemerintahan orde baru pers Indonesia merasakan kebebasan yang sangat besar. Setelah beberapa media pers yang sebelumnya diberedeli di pemerintahan Orde lama ini mendapatkan kebebasannya kembali. Hal ini sontak menjadi angin segar bagi Pers Indonesia. Dan mereka mengalamieuforia pers di awal pemerintahan orde baru. Seiring berjalannya waktu euforia pers ini tidak dirasakan kembali, mengingat tahun-tahun selanjutnya ketika pemerintahan orde baru sudah kokoh, perlakuan pemerintah terhadap pers ikut berubah. Memasuki tahun 1970-an pers yang semakin kritis terhadap pemerintah satu persatu mulai diberedeli, dan puncak pemberedelan ini terjadi pasca terjadinya sebuah peristiwa besar di awal tahun 1974. Peristiwa demonstrasi besar-besaran terjadi di tanggal 15 Januari 1974. Demonstrasi yang dilakukan oleh golongan mahasiswa ini adalah demonstrasi untuk mengangkat isu terkait penanaman modal asing di Indonesia yang kian hari semakin banyak, terutama modal asing yang berasal dari Jepang. Aksi ini berakhir menimbulkan kerusuhan akibat adanya oknum lain yang ikut terjun melakukan aksi di waktu yang bersamaan. Pada akhirnya aksi demonstrasi ini menimbulkan huru-hara di daerah Jakarta, dalam peristiwa ini banyak pertokoan yang dibakar, penjarahan pertokoan, hingga pembakaran kendaraan seperti mobil dan motor yang merupakan produk Jepang. Peristiwa ini dikenal juga sebagai peristiwa Malari (malapetaka 15 Januari) 1974. Pers yang pada saat itu ikut mengkritik pemerintah terkait isu modal asing serta ikut menerbitkan berita terkait peristiwa ini juga terkena dampak dari peristiwa Malari ini. Setidaknya ada 12 media pers yang di bredeli pasca terjadinya peristiwa Malari.

Kata Kunci: Pers, Orde Baru, Malari

Abstract

At the beginning of the New Order government, the Indonesian press felt immense freedom. After several press media that were previously banned in the Old Order government got their freedom back. This suddenly became a breath of fresh air for the Indonesian press. And they experienced press euphoria at the beginning of the new order government. Over time, the euphoria of the press was not felt again, considering that in the years that followed, when the New Order government was solid, the government's treatment of the press also changed. Entering the 1970s, the press, which were increasingly critical of the government, began to bebanned one by one, and the peak of this ban occurred after a major event occurred in early 1974. Massive demonstrations occurred on January 15, 1974. Demonstrations were

carried out by this group of students. is a demonstration to raise issues related to foreign investment in Indonesia, which is increasing day by day, especially foreign capital originating from Japan. This action ended up causing a riot due to other elements who took part in the action at the same time. In the end, this demonstration caused riots in the Jakarta area, in this incident many shops were burned, looted shops, to the burning of vehicles such as cars and motorbikes which were Japanese products. This incident is also known as theMalari incident (January 15 disaster) 1974. The press at that time participated in criticizing the government regarding the issue of foreign capital and in publishing news related to this incident, was also affected by the Malari incident. At least 12 press media were banned after the Malari incident.

Keywords: Press, Orde Baru, Malari

PENDAHULUAN

Orde Baru di mulai sejak Soeharto secara resmi di ambil sumpahnya sebagai pejabat presiden pada tanggal 17 Maret 1967 dan di kukuhkan sebagai presiden Indonesia masih di bulan yang sama di tahun berikutnya, yaitu pada bulan Maret tahun 1968. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden Ia di hadapi beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat itu, terutama terkait stabilitas yang lemah warisan masa kepemimpinan Soekarno. Soeharto di hadapkan sebuah pertanyaan soal usaha apa yang bisa di lakukannya untuk membangun kembali Indonesia untuk mencapai Indonesia yang stabil dan sejahtera.

Soeharto mulai melihat langkah-langkah yang seharusnya Ia ambil untuk mengukuhkan Orde Baru yang baru saja lahir. Salah satu langkah yang di ambil oleh Soeharto adalah dengan melakukan konsolidasi, yaitu dengan merangkul beberapa unsur yang sebelumnya sempat di tekan serta di perlakukan secara represif di masa pemerintahan Orde Lama. Hal ini dianggap sebagai kesempatan yang bagus bagi para unsur oposisi yang sebelumnya berusaha bersama dalam menumbangkan masa pemerintahan Orde Lama.

Pers merupakan salah satu unsur yang mendapatkan dampak dari konsolidasi Soeharto ini. Di awal pemerintahan Orde Baru, Pers seakan-akan mendapatkan angin segar karena di berikan kebebasan dalam menyuarakan segala pendapat. Di tahun 1966 Undang-Undang yang mengatur Pers di sahkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966, dimana Undang-Undang ini mengatur segala ketentuan pokok Pers. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur serta menjamin akan kemerdekaan Pers. (Imron & Yunianto, 2016). Peraturan ini dianggap sebagai angin segar bagi dunia Pers dimana mereka mendapatkan kebebasannya kembali setelah pada masa sebelumnya mendapatkan pembatasan karena perilaku dari pemerintah sebelumnya. Dan hal ini dianggap sebagai masa euforia kebebasan Pers.

Masa euforia yang di alami Pers Indonesia ini tidak berlangsung lama, karena beberapa tahun setelahnya tindakkan pemerintah terhadap pers berubah, hal ini bisa terjadi karena format politik baru sudah mulai terbentuk serta kekuatan pemerintah sudah memiliki stabilitas yang kokoh. kebebasan pers yang sebelumnya di canangkan pemerintah nyatanya hanyalah sebuah guyonan belaka. Di masa ini para

penerbit di haruskan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari lembaga kemiliteran KOPKAMTIB. Dan jika salah satu atau kedua lembaga ini mencabut izin nya maka, secara efektif media tersebut bisa di katakan diberedel

Memasuki tahun 1970-an banyak pergerakan yang di lakukan oleh mahasiswa dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Seperti di tahun 1970 berbagai aksi dan protes di lakukan oleh para mahasiswa. Gelombang protes ini di dasari oleh masalah-masalah yang ada di masa pemerintahan Soeharto, seperti masalah terkait pendidikan, inflasi, merajalelanya korupsi, hingga soal isu modal asing yang sudah terlalu banyak masuk ke Indonesia (Jazimah, 2013). Gerakan mahasiswa ini tidak lain dan tidak bukan karena dorongan dari ketidakpuasan akan pemerintahan orde baru. seiring banyaknya gerakan mahasiswa Pers juga ikut kena imbasnya karena secara aktif juga melakukan berbagai kritik terhadap pemerintah , dan hal ini juga berimbas pada pemberedelan beberapa surat kabar seperti Majalah *Sendi* yang di beredel pada tahun 1972, kemudian surat kabar *Sinar Harapan* juga ikut di larang terbit pada tahun 1973.

Puncak pemberedelan ini terjadi pada tahun 1974 setelah meledaknya sebuah kerusuhan besar di awal tahun itu. Tepatnya pada tanggal 15 Januari tahun 1974 dimana Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kedatangan perdana menteri Jepang ke Indonesia. aksi demo ini berujung rusuh karena berbagai onum dari luar mahasiswa ikut bergabung dan menyebabkan huru-hara yang cukup besar. Kerusuhan ini di sebut juga sebagai Malapetaka 15 Januari atau biasa di singkat menjadi Malari. Setelah kejadian Malari ini banyak penerbitan pers yang di larang terbit lagi karena dianggap kurang memiliki rasa tanggung jawab , terutama terkait stabilitas nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkah sejumlah data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, dokumen, majalah, dll. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak di sampaikan langsung oleh saksi mata ataupun tidak terbit di masa kejadiannya. Sumber sekunder ini dapat berupa buku-buku, artikel jurnal, koran, dan juga majalah. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis studi kepustakaan.

Untuk mendapatkan sumber dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber berupa buku maupun jurnal sebagai referensi dalam mendapatkan informasi terkait tema yang di ambil dalam penelitian ini. Yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber berupa jurnal dan buku yang membahas seputar pemberedelan pers di masa Orde Baru serta terkait peristiwa malapetaka 15 Januari 1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1970-1973 banyak pers melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, seperti yang di lontarkan terhadap Asisten Pribadi Presiden (ASPRI), kegagalan kinerja BULOG (Badan Urusan

Logistik), proyek TMII, dan juga terkait isu modal asing terutama dari Jepang. Isu-isu tersebut banyak diangkat oleh beberapa media pers dalam melontarkan kritik pedasnya. Kritik ini di lontarkan dengan alasan ketidakpuasan rakyat akan pemerintah pada saat itu.

Asisten Pribadi Presiden (ASPRI) menjadi sasaran kritik dari pers Indonesia pada sat itu. Di awal pemerintahan Soeharto terjadi sebuah dualisme kepemimpinan dimana Soeharto memberikan kepercayaannya juga kepada SPRI (Staf Pribadi) Pers menganggap bahwa SPRI ini bukanlah kabinet yang bertugas untuk membantu presiden, akan tetapi dianggap sebagai "kabinet bayangan" lantaran memiliki dominasi yang lebih di dalam pembangunan nasional . Aksi kritik ini juga di lakukan oleh para mahasiswa yang melontarkan kritikannya terhadap ASPRI terutama kepada Ali Moertopo beserta Soedjono Hoemardani yang dinilai tingkah laku mereka malah menjerumuskan Indonesia kedalam lilitan hutang serta ketergantungan akan modal asing, terutama kepada jepang.

Kritik tajam terhadap BULOG banyak di lontarkan oleh beberapa media seperti *Majalah Tempo* yang menerbitkan kritikan pedas terhadap BULOG, disini *Tempo* mengkritisi salah satu kebijakan BULOG yaitu droping beras, yang dianggap belum bisa mengatasi kelangkaan beras(Muniroh, 2018). Selain melayangkan kritik terhadap BULOG *Tempo* juga melayangkan kritiknya terhadap pemerintah beserta aparatnya terkait kebijakan serta kinerjanya yang dinilai belum bisa mengumpulkan beras dan mengatasi kelangkaan beras di Indonesia. selain itu ada Harian Sinar Harapan yang juga ikutmengkritik persoalan BULOG ini, dan masalah utama yang di kritik dalam Harian Sinar Harapan ini adalah terkait pendistribusian beras yang menggambarkan bagaimana BULOG gagal dalam hal tersebut (Dewi & Ba'in, 2021). Kedua penerbit ini mengkritisi bagaimana kinerja BULOG yang dianggap belum bisa mengatasi kelangkaan beras di beberapa daerah, atau gagal dalam pendistribusianberas.

Kritik terhadap isu proyek TMII (Taman Mini Indonesia Indah) yang dicanangkan oleh Ibu TienSoeharto. Proyek TMII ini di canangkan untuk membangun sebuah tempat wisata. di masa negara dalam kondisi kekurangan dalam bidang keuangan, serta mencoba untuk menekan pengeluaran yang tidak terlalu di butuhkah. Ibu Tien justru merencanakan mega proyek yang di rasa tidak begitu di perlukan pada saat itu. Akibatnya proyek ini mendapatkan respons dari golongan mahasiswa yang menilai proyekini sebagai penghambur-hamburan uang untuk kepentingan yang tidak terlalu penting, para mahasiswaberanggapan bahwa uang yang akan di gunakan untuk proyek TMII ini sebaiknya di gunakan untuk mengatasi maraknya kemiskinan yang tak kunjung hilang (Vickers, 2005). selain itu masyarakat menganggap bahwa proyek ini merupakan hal yang tidak seharusnya di lakukan dan tidak juga dibutuhkan mengingat Negara pada saat itu sedang mengalami kejatuhan. Beragam protes pun di lancarkan oleh masyarakat dan juga mahasiswa, protes ini diantaranya adalah Gerakan Penghematan, Gerakan Akal Sehat, dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat. Dalam aksi protes ini pers juga turut andil dalam memberikan kritik terhadap rencana proyek TMII, salah satu surat kabar yang mengkritik ini adalah *Sinar Harapan*, mereka turut mendukung gerakan-gerakan terkait proyek TMII ini dengan menerbitkan berita yang berisi kritikan tajam terhadap proyek TMII (Dewi & Ba'in, 2021). Selain itu

surat kabar lain seperti Surat Kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* ikut melancarkan kritik pedasnya terhadap proyek tersebut (Andi Suwirta, 2018).

Isu terkait penanaman modal asing di Indonesia menjadi isu yang serius pada saat itu. Seperti berita-berita yang di terbitkan oleh Koran *Indonesia Raya* yang membuat setidaknya tiga berita soal masalah ini. Berita pertama berjudul "Modal Jepang Harus Koreksi Diri" yang mana disini koran tersebut menyebutkan bahwa modal Jepang yang di taman di Indonesia justru akan merugikan rakyat. Selanjutnya berita kedua yang di terbitkan berjudul "Apa Tujuan Penanaman Modal Jepang di Asia ?"melalui berita ini koran tersebut mengkritik bahwa penanaman modal jepang ini bisa di katakan sebagai bentuk kolonialisme teknologi. Berita selanjutnya adalah "Penolakan Kedatangan Perdana Menteri Jepang" melalui berita ini Koran *Indonesia Raya* melontarkan kritikannya terhadap kedatangan PerdanaMenteri Jepang dengan di suguhkannya kenangan pahit hubungan indonesia dan jepang di masa lalu yang banyak merugikan Indonesia.

Dalam kurun waktu tahun 1970-1973 juga terdapat beberapa peristiwa pemberedelan terhadap surat kabar yang ada pada saar itu, seperti pada 1971 terdapat dua penerbit yaitu *Harian Kami* dan *Duta Masyarakat* yang di cabut izin terbitnya untuk sementara waktu, karena tidak mengindahkan peraturan pemerintah untuk tidak membuat berita serta melontarkan komentar di sepanjang minggu tenang berlangsung, yaitu sesaat sebelum pemilihan umun di laksanakan. Selanjutnya pada tahun 1972 dimana kala itu yang menjadi korban pemberedelan ini adalah *Majalah Sendi*. Majalah tersebut di beredel lantaran kedapatan memuat tulisan yang dianggap menghina Kepala Negara beserta keluarganya. Akibat dari perbuatannya tersebut *Majalah Sendi* kehilangan Surat Izin Cetaknya, serta pemimpin redaksi-nya di tuntut di pengadilan (Triwardani, 2010). Di awal tahun 1973 pencabutan Surat Izin Cetak ini juga terjadi, tepatnya di bulan Januari 1973. Yang menjadi korban dalam pencabutan izin ini adalah *Sinar Harapan.* Pencabutan SIC dari Sinar Harapan ini dilakukan oleh KOPKAMTIB, namun pencabutan izin ini tidak berlaku selamanya, karena pada saat itu SIC *Sinar Harapan* hanya di cabut selama delapan hari. Pencabutan SIC ini dilakukan lantaran Sinar Harapan dianggap membocorkan RAPBN tahun 1973-1974, yang mendahului pengumuman resmi dari presiden kepada DPR. Pemberedelan terhadap pers memang sudah terjadi bahkan sebelum terjadinya peristiwa malapetaka 15Januari. Namun pada saat itu pemberedelan ini tidak separah sesaat setelah peristiwa Malari itu berlangsung.

Perlu kita ketahui bahwa kritik-kritik yang di lontarkan oleh Pers seperti yang di lontarkan oleh Koran *Indonesia Raya* terkait modal asing menunjukkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa yang cukup besar di awal tahun 1974 ini, Pers memang berperan penting dalam menyuarakan kritiknya terhadap modal asing jepang, yang mana kritiknya tersebut juga di sertai oleh kritik dari berbagai pihak, salah satunya adalah Mahasiswa. Kritik terhadap modal asing terutama dari Jepang inilah yang menjadi topikutama dalam gerakan yang di lakukan mahasiswa pada saat Malari terjadi.

Peristiwa Malari

Serangkaian kritik sosial oleh pers dan juga aksi protes yang di lakukan oleh mahasiswa sebelum tahun 1974 ter akumulasikan dengan kekecewaan bangsa Indonesia terhadap pemerintah ini pada akhirnya memicu lahirnya sebuah gerakan mahasiswa yang lebih masif dan juga radikal di awal tahun 1974. Gerakan mahasiswa ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 dengan tujuan untuk menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang yaitu Tanaka ke Indonesia.

Aksi yang di lakukan mahasiswa ini di awali dengan berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 14 Januari 1974. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang. Aksi yang di gelar di tanggal 14 ini berjalan secara lancar serta dinamis. Masa menyuarakan suaranya terkait keresahan masyarakat, sikap anti cukong, dan yang utama adalah terkait modal asing terutama dari Jepang (Jazimah, 2013). Di tanggal ini tidak terjadi keributan karena memang masa yang tergabung dalam aksi ini hanya dari golongan mahasiswa saja, tidak ada elemen lain yang ikut dalam masa demonstrasi.

Masa yang tergabung dalam aksi di tanggal 14 Januari ini tidak berhasil memasuki lapangan udara Halim Perdana Kusuma karena penjagaan area tersebut sangat kuat. Para petugas keamanan dengan sigap menghadang para demonstran untuk bisa memasuki area lapangan udara Halim Perdana Kusuma (Padiarta, 2015). Pada akhirnya aksi yang di lakukan di tanggal 14 Januari ini bisa di bilang gagal karena memang penjagaan di area sekitar Halim Perdanakusuma yang tidak bisa di tembus oleh masa. Dan masa demonstran ini merencanakan seruan aksi kembali di keesokan harinya, tepatnya di tanggal 15 Januari 1974.

Pagi hari tanggal 15 Januari, masa demonstran yang terdiri dari mahasiswa beserta aktivis non kampus berkumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI), yang berada di jalan Salemba, tepatnya di Jakarta Pusat. Pusat acara kemudian pindah ke Universitas Trisakti. Aksi demonstrasi ini kemudian dimulai pada jam 08.00, para demonstran mulai berjalan dari Salemba menujujalan Raden Shaleh. Masa terus bergerak menyusuri jalan sampai ke Monumen Nasional. Di dalam perjalanannya jumlah demonstran menjadi bertambah banyak. Hal ini karena para pelajar SMA juga ikutandil dalam demonstrasi tersebut (Padiarta, 2015).

Disisi lain tempat juga terjadi aksi masa, salah satunya adalah terjadi di Pasar Senen, dimana masa yang tergabung mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat Baru 1974 (Tritura Baru 1974), yang isinya diantaranya adalah menuntut pembubaran Aspri, turunkan harga, dan yang terakhir adalah gayang korupsi. Masa yang bergerak di Pasar Senen ini cukup beringas dan membuat kerusuhan yang besar. Dimana mereka membakar sejumlah pertokoan yang ada disana. Selain itu terdapat juga aksi penjarahan toko. Pecahnya masa di Pasar Senen sebenarnya bukan merupakan masa dari golongan mahasiswa, karena pada saat kerusuhan terjadi di Pasar Senen, mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi masih menggelar apel di Trisakti (Wirajati, 2018). Aksi-aksi kerusuhan para demonstran yang terjadi seperti di Pasar Senen dan daerah lainnya di Jakarta, menimbulkan kerusuhan besar di Jakarta pada saat

itu.

Dari pembakaran gedung, penjarahan toko, hingga ke pembakaran kendaraan yang merupakan produk jepang, menambah huru-hara aksi demonstrasi mahasiswa yang akan di lakukan. Aksi yang di lakukan di Pasar Senen dan di sejumlah daerah lainnya bukan merupakan aksi dari golongan mahasiswa, dan aksi tersebut mencederai aksi yang di lakukan mahasiswa di tanggal 15 Januari 1974. Aksi kerusuhan yang bersamaan dengan aksi mahasiswa dalam menyampaikan kritik ini, memberikan pandangan burukterhadap golongan mahasiswa.

Setelah golongan mahasiswa menggelar aksi di tanggal 15 Januari 1974. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa ini diakhiri oleh apel, dan setelah apel ini dilaksanakan mahasiswa pun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Di lain sisi masa yang membuat keonaran seperti membakar toko menjarah toko serta membakar kendaraan masih terus berlanjut hingga ke malam hari, masa yang tergabung dalam kerusuhan ini merupakan unsur-unsur tidak terkontrol di luar masa mahasiswa, di mana unsur yang tidak terkontrol ini berisi ratusan hingga ribuan masa yang mana diantaranya berisi para preman, pencuri, serta perusuh. Masa yang tidak terkontrol ini terus melakukan aksi yang tidak terpuji. Berbagai organisasi mencoba untuk menyuarakan agar masa yang ada pada saat itu bisa berjalan dengan tenang, di sini Hariman Siregar selaku ketua DMUI juga mencoba untuk menenangkan masa akan tetapi dia gagal. Sehingga Masa terus melakukan kerusuhan di sepanjang malam tanggal 15 Januari 1974.

Melihat bagaimana unjuk rasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1974, kita bisa ketahui bahwa masa yang melakukan keonaran seperti pembakaran gedung, penjarahan toko, serta pembakaran kendaraan produk Jepang, nyatanya tidak dilakukan oleh golongan mahasiswa. Ada kenyataannya adamasa dari golongan lain yang juga melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, seperti yang terjadi di pasar Senen, di mana masa melakukan banyak tindakan tidak terpuji sehingga menimbulkan kerusuhan yang besar di tanggal 15 Januari 1974.

Peristiwa malapetaka 15 Januari ini menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian yang besar. Ada 11 orang meregang nyawa, 17 orang luka berat, dan 120 orang lainnya mengalami luka ringan. Terhitung setidaknya ada 807 mobil beserta 187 motor menjadi korban pembakaran masa pada aksi demonstrasi 15 Januari 1974. Selain itu ada sebanyak 144 bangunan yang dibakar oleh massa serta setidaknya ada 164 kg emas yang hilang karena dijarah oleh masa. Peristiwa malapetaka 15 Januari ini tentunya menimbulkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Oleh karenanya setelah peristiwa tersebut terjadi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut mengalami penangkapan serta penahanan oleh pemerintah. Selain itu pers yang menulis terkait peristiwa tersebut banyak yang di beredel. Dalam artian dicabut surat izin cetak dan surat izin terbitnya. Setidaknya ada 12 media pers yang dibredel pasca peristiwa malapetaka 15 Januari 1974.

Pemberedelan Pers pasca Malari

Setelah terjadinya aksi huru hara pada tanggal 15 Januari pemerintah gencar dalam menertibkan pers. Pemerintah mulai melakukan langkah-langkah yang lebih represif terhadap pers dan Mahasiswa (Abar, 1995). Setidaknya ada 12 penerbit yang di cabut izinnya untuk terbit. Pemberedelan ke 12 penerbit pers ini di lakukan pemerintah melalui pencabutan Surat Izin Terbit (SIT). Selain pencabutan SIT, pemberedelan ini juga di pertegas oleh pencabutan Surat Izin Cetak (SIC). Ke 12 surat kabar ini di antaranya adalah, *Harian KAMI, Abadi, Nusantara, Mingguan Senang, The Jakarta Times, PemudaIndonesia, Pedoman, Majalah Berita Mingguan Ekspres, Seluruh Berita* (Surabaya), *Indonesia Pos* (Ujung Pandang) dan *Mahasiswa Indonesia*. dari kedua belas penerbit ini hanya ada dua penerbit yang diizinkan kembali untuk terbit, dan perizinan terbit ini didapatkan setelah melakukan serangkaian perombakan serta perampingan staf, kedua penerbit ini yaitu, *Pelita* (menggantikan *Abadi*) dan juga *The Indonesian Times* (menggantikan *The Jakarta Times*).

Tujuan dari pemerintah melakukan pemberedelan terhadap 12 media ini adalah untuk menjaga stabilitas politik dan kepentingan umum, pemerintah menganggap pemberitaan yang di terbitkan oleh pers dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Imron & Yunianto, 2016) Dalam Triwardani (2010) juga di jelaskan bahwa tindakan pers ini sudah menjurus ke usaha dalam melemahkan kehidupan nasional, dengan mengangkat isu terkait modal asing, dwi fungsi, korupsi, kejelekan aparat pemerintah, selain itu pers juga dianggap merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghasut rakyat untuk berbuat melakukan pergerakan yang mengganggu ketertiban sertakeamanan negara, dan juga menciptakan peluang untuk terjadinya perbuatan makar. Hal inilah yang membuat citra pers pasca terjadinya Malari menjadi buruk dimata pemerintah.

Berbagai tuduhan ini di lontarkan pemerintah terhadap perusahaan penerbit yang sebelum kejadian aksi Malari sudah aktif mengkritik pemerintah dan juga membuat pemberitaan terkait aksi-aksi yang di lakukan oleh Mahasiswa pada saat peristiwa Malari berlangsung. Sebelum terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 15 Januari beberapa surat kabar membuat pemberitaan terkait sebuah acara tirakatan (tradisi Jawa untuk berpuasa dan tidak tidur semalaman) yang di hadiri oleh Hariman Siregar yang merupakan ketua Dewan Mahasiswa UI, dan juga Hatta Albanik yang merupakan ketua Dewan Mahasiswa UNPAD yang menyatakn sepakat akan melaksanakan pergerakan dan juga perlawanan terhadap pemerintah. Salah satu pers yang memuat pemberitaan soal acara ini adalah harian *Pelita* yang menerbitkan berita dengan judul "Dioalog Terbuka DM/SM-UI dengan seluruh mahasiswa kampus Salemba". Dari pemberitaan inilah pemerintah menganggap bahwa berita tersebut memicu terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (Dewi & Ba'in, 2021). Dan dari sinilah awal dimana pemerintah menganggap bahwa pers memiliki peranan penting dalam terjadinya sebuah aksi demonstrasi yang terjadi di tanggal 15 Januari 1974 yang menjadi aksi yang penuh dengan huru-hara.

Aksi pemberedelan setelah terjadinya peristiwa Malari ini secara dramatis menghancurkan hubungan antara pemerintah dan pers. Pihak berwenang mulai melakukan aksinya untuk menertibkan

pers, seperti memasukkan jurnalis yang di pandang 'menghina' ke dalam daftar hitam (Rubba, 2020). Dari sini industri pers dianggap telah redup karena bukan lagi sebuah lahan yang menjanjikan. Para jurnalis yang sebelumnya menjadi bagian dari pemberedelan susah untuk bergabung bersama media yang lain. Seperti yang terjadi kepada mantan jurnalis Pedoman dan juga Indonesia Raya yang mencoba untuk bergabung bersama Cahaya Kita yang pada saat itu tidak terkena imbas pemberedelan, tidak bisa bergabung lantaran Direktorat Jendral mengeluarkan pernyataan bahwa semua mantan jurnalis yang sebelumnya bekerja di koran-koran yang sudah di beredel wajib memiliki surat izin, yaitu surat izin klasifikasi dari Direktorat Jenderal untuk bisa bergabung di perusahaan penerbit yang lain. Di saat itu yang tersisa hanyalah surat kabar yang moderat, sedangkan surat kabar yang bersifat moderat berhasil di sapu bersih oleh pemerintahan Orde Baru (Hill, 2011).

KESIMPULAN

Memasuki 1970-an di dinamika pers di Indonesia mulai berani untuk menerbitkan berita yang mengkritik terhadap pemerintah. Kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh media pers ini sudah terjadi bahkan sebelum terjadinya sebuah aksi hebat pada tanggal 15 Januari 1974. Di awal pemerintahan orde baru pers memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah,karena di masa orde baru ini pers yang sebelumnya dibatasi di masa orde lama, kembali dibebaskan untuk terbit di masa orde baru. Namun kebebasan pers ini tidaklah berlangsung lama, karena seiring berjalannya waktu ketika pemerintah sudah dirasa kokoh, pers mulai dianggap sebagai pengganggu dalam stabilitas nasional. Sejumlah mulai dibredel di tahun 1970 - 1974.

Pemberedelan secara massal dilakukan setelah terjadinya sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di tanggal 15 Januari 1974. Pemerintah menganggap bahwa sejumlah pers pada saatitu turut serta dalam mengkritisi pemerintah hingga terjadinya sebuah huru-hara yang menelankorban jiwa dan juga kerugian materi. Pers juga dianggap kurang memiliki rasa tanggung jawab terutama terkait stabilitas nasional. Setidaknya ada 12 media pers yang kehilangan surat izinnya untuk menerbitkan berita. Dan diantara kedua belas pers ini hanya dua diantaranya bisa kembali terbit setelah melakukan permintaan maaf terhadap pemerintah, serta melakukan perombakan di dalam perusahaan penerbitnya.

Masa-masa setelah terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di tanggal 15tersebut merupakan masa di mana Pers Indonesia mengalami masa yang kelam. Karena pascaperistiwa tersebut sejumlah pers kehilangan surat izin terbitnya. Sehingga sejumlah pers tersebut tidak bisa kembali menerbitkan pemberitaan di Indonesia. Selain media percetakan yang juga dicabut izinnya untuk menerbitkan berita ada juga jurnalis mantan dari perusahaan penerbit yang dipersulit oleh pemerintah untuk bisa bergabung ke perusahaan penerbit yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abar, A. Z. (1995). *1966-1974: Kisah Pers Indonesia*. LKiS.

Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Vickers, A. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Insan Madani.

Jurnal

Andi Suwirta. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru : Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam pandangan Surat Kabar Merdeka dan Indonesia Raya di Jakarta. *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, *6*(1), 73–98.

Dewi, A. R. M., & Ba'in. (2021). Pers dan Pemberitaan Sosial-Politik Orde Baru Dalam Sorotan Harian Sinar Harapan 1866-1986. *Jurnal of Indonesian Histoory*, *10*(1), 24–32.

Imron, & Yunianto, S. T. (2016). Pemberedelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Jurnal Candi*, *13*(1), 143–159.

Jazimah, I. (2013). MALARI : STUDI GERAKAN MAHASISWA MASA ORDE BARU. *Jurnal Agastya*, *03*(01), 9–34.

Muniroh, S. (2018). Kritik Sosial Majalah Tempo Terhadap Kasus Kelangkaan Beras di Indonesia Tahun 1972-1973. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *6*(2), 324–333.

Padiarta, A. M. (2015). INTRODUCTION TO MALARI : DARI SITUASI, AKSI, HINGGA RUSUH PADA AWAL ORDE BARU 1970-1974. *Jurnal Criksetra*, *4*(8), 103–119.

Rubba, R. M. (2020). Kedaulatan Rakyat 1974-1994. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *9*(1).

Triwardani, R. (2010). Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perpektif Politik Media. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, *7*(2), 187–208.

Wirajati, Y. de B. (2018). Mahasiswa dan Malari : Telaah Perilaku Kolektif Mahasiswa Indonesia 1973-1974. *Lensa Budaya*, *13*(2), 166–177.